

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan mengenai fungsi sosial politik ABRI (TNI) di Indonesia ditinjau dari sudut pandang Islam dari tahun 1945 (sejak lahirnya negara Republik Indonesia) sampai dengan tahun 1989 dala skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Fungsi sosial ABRI di Indonesia lahir (ada) bersama dengan berdirinya negara Indonesia yaitu sejak diproklamasikannya kemerdekaan negara RI. Fungsi sospol ini muncul dikalangan para pejuang bersama rakyat sebagai usaha mempertahankan kemerdekaan dari pihak penjajah karena ketidaksiapan politisi sipil setelah ditinggal penjajah.
2. Peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia sampai tahun 1989 secara umum bermanfaat bagi bangsa dan negara serta banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa ini walaupun tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan.
3. Peran atau fungsi sosial politik ABRI (TNI) ini sebagaimana dalam pembahasan ini secara umum tidak bertentangan denga hukum Islam, karena tidak adanya nash atau dalil yang mengakuinya atau membatalkannya

dengan jelas dan telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara walaupun ada penyimpangan-penyimpangan, namun sudah berusaha diperbaiki sedikit demi sedikit dan secara umum dari adanya fungsi sosial politik BRI (TNI) ini bermanfaat.

B. Saran-saran

Setelah memperhatikan simpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan solusi bagi peran sosial politik ABRI (TNI) dimasa yang akan datang :

1. Fungsi sosial politik ABRI (TNI) dengan menempatkan personil-personilnya diluar bidang hankam harus diarahkan dan diorientasikan pada prinsip keadilan, kebersamaan dan keberpihakan kepada rakyat, sehingga peran tersebut menghapus kecemburuan pihak-pihak yang tidak suka dengan fungsi sosial tersebut dan perlahan-lahan dikurangi atau dihapus sama sekali sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sipil Indonesia.
2. Dengan demikian ABRI (TNI) harus memberi kesempatan pada kelompok sipil untuk berkiprah dalam konstelasi politik bernegara dan berbangsa sebagai imbalan terhadap terwujudnya proses demokrasi yang bebas sesuai dengan cita-cita kemerdekaan seperti yang terdapat dalam UUD 45 dan Pancasila.